**http://riadjohani.wordpress.com/tag/fasilitator-masyarakat/**

**Arsip Tag: fasilitator masyarakat**

Apr25

[**PEMBERDAYAAN sebagai Kerja Fasilitator Masyarakat**](http://riadjohani.wordpress.com/2013/04/25/pemberdayaan-sebagai-kerja-fasilitator-masyarakat/)

Posted on [25 April 2013](http://riadjohani.wordpress.com/2013/04/25/pemberdayaan-sebagai-kerja-fasilitator-masyarakat/) by [riadjohani](http://riadjohani.wordpress.com/author/riadjohani/)

[Standar](http://riadjohani.wordpress.com/tag/fasilitator-masyarakat/)

PEMBERDAYAAN merupakan kata yang paling sering disebutkan dalam program pembangunan. Bukan hanya sebagai prinsip. Bukan pula sebagai proses kerja. Melainkan juga sebagai judul program.

PNPM misalnya. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.

Juga sebagai kata dalam sebuah profesi, yaitu FPM.

Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat. Ini adalah nama resmi profesi fasilitator yang sudah didaftarkan di Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sejak tahun 2012.

\*\*\*

PEMBERDAYAAN merupakan kata-kata yang terlalu sering diucapkan tapi tidak dimaknai. Bahkan hanya untuk mengenal arti harfiahnya saja masih banyak orang yang tidak berusaha memahami. Pemberdayaan berasal dari kata benda (*noun*) Bahasa Inggris yaitu *empowerment*. Kata dasarnya *power*, artinya daya atau kekuatan.

Bagaimana kita mengartikan pemberdayaan tergantung pada teori dan konsep yang dipakai. Saya akan memperkenalkan pengertian Pemberdayaan berdasarkan teori dan konsep yang dikembangkan oleh Robert Chambers dan banyak digunakan sebagai kerangka pemberdayaan dalam menggunakan metodologi pendekatan partisipatif program pengembangan masyarakat (*community development*).

Pemberdayaan artinya adalah sebuah proses membuat berdaya pihak yang tidak/kurang berdaya (*the powerless*) dan sebaliknya mengurangi orang/pihak yang terlalu dominan atau berkuasa (*the powerfull*) agar terjadi pola relasi kekuasaan (*power relations*) yang berimbang dan harmoni dalam sebuah tatanan masyarakat.  Sebenarnya skala hubungan kekuasaan yang dimaksud oleh Chambers itu bukan hanya dalam skala komunitas (hubungan antara elit lokal dengan warga),tetapi juga dalam skala negara (hubungan antara pusat pembangunan dan wilayah periferi atau pinggiran) dan skala global (hubungan antara negara kaya-miskin).

Tentu saja sebaiknya Anda membaca sendiri buku dan tulisan Rober Chambers sendiri untuk memahami konsep ini antara lain dari buku berikut:

* Whose Reality Counts, Putting the First Last, Robert Chambers, Intermediate Technology Pub., 1997.
* *Rural Appraisal: Rapid, Relaxed, and Participatory, Discussion Paper,* Robert Chambers, IDS, 1992.
* *Rural Development; Putting The Last First*, Robert Chambers, Longman Scientific and Technical, 1983.

Buku yang sudah diterjemahkan:

* Pembangunan *Desa; Mulai dari Belakang*, Robert Chambers, LP3ES, 1987.
* *Participatory Rural Appraisal (PRA); Memahami Desa secara Partisipatif*, Robert Chambers, Oxfam – Yayasan Mitra Tani, 1996.

\*\*\*

MENGUKUR PEMBERDAYAAN masyarakat sebagai sebuah capaian program tergantung pada rumusan yang dibuat oleh perancang program yaitu lembaga pembangunan, baik itu pemerintah maupun non-pemerintah, lokal, nasional maupun internasional yang mengerjakan program pengembangan masyarakat atau program pemberdayaan masyarakat di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Yang jelas, ukuran pemberdayaan haruslah merupakan kriteria-indikator perubahan pola relasi kekuasaan, baik itu ekonomi, sosial, maupun politik. Baik itu antara berbagai kelas sosial dan ekonomi, elite dan rakyat, maupun perempuan dan lelaki di dalam masyarakat patriarki yang masih memiliki ketimpangan pola relasi kekuasaan antar kelas, ras, kelompok, generasi/usia dan gender.

Sebagai salah satu kerangka konseptual untuk bisa membuat kriteria-indikator pemberdayaan bagi program kita, dapat digunakan  tujuh (7) macam jenis kekuasaan dari Jim Ife.  Ketujuh jenis kekuasaan ini satusama lain saling berhubungan dalam cara-cara yang kompleks, dan kategori (jenis) yang lain dapat saja di tambahkan.

**Kekuasaan atas kesempatan dan pilihan pribadi.** Agenda pemberdayaan, seharusnya bekerja untuk mengembangkan kemampuan individu dalam menentukan berbagai pilihan pribadi.

**Kekuasaan atas definisi dari kebutuhan.** Pada sudut pandang pemberdayaan, seharusnya masyarakat diberikan kekuasaan untuk mendefinisikan dan merumuskan kebutuhan mereka sendiri dan agar masyarakat mampu mendefinisikannya maka proses pemberdayaan menuntut adanya akses terhadap pendidikan dan informasi.

**Kekuasaan atas ide.** Untuk mengurangi dominasi elite kekuasaan atas ide perlu dikembangkan kapasitas warga masyarakat dalam memasuki forum dialog dalam pembuatan keputusan publik sehingga pendidikan (formal dan non-formal) merupakan aspek penting dari pemberdayaan.

**Kekuasaan atas intitusi.** Strategi pemberdayaan juga bisa bertujuan untuk meningkatkan akses dan kontrol warga masyarakat terhadap institusi-institusi yang membuat keputusan publik,  selain upaya perubahan terhadap institusi-institusi ini agar lebih terbuka, responsif, dan akuntabel.

**Kekuasaan atas sumber daya.** Salah satu strategi pemberdayaan adalah semaksimal mungkin memberi akses pada banyak orang terhadap pembagian dan penggunaan sumberdaya yang lebih merata.

**Kekuasaan atas aktivitas ekonomi. P**roses pemberdayaan seharusnya juga memastikan bahwa kekuasaan atas aktivitas ekonomi dapat dibagikan (didistribusikan) secara adil meskipun tidak merata atau sama.

**Kekuasaan atas reproduksi.** Reproduksi tidak hanya diartikan sebagai proses kelahiran, melainkan juga proses membesarkan anak, memberikan pendidikan dan keseluruhan mekanisme (sosial, ekonomi, dan politik) yang mereproduksi generasi penerus.  Kekuasaan atas repoduksi termasuk kategori kekuasaan atas pilihan pribadi dan kekuasaan atas ide.

Sebaiknya Anda juga membaca mengenai hal ini di buku berikut:

* Community Development ; Creating Community Alternatives, Vision, Analysis & Practice; Jim Ife, Longman, 1995.

\*\*\*

Pemberdayaan adalah upaya untuk perubahan tatanan ekonomi-sosial-politik yang lebih adil. Adil dalam hal ini diartikan bahwa terdapat pembagian kekuasaan (*sharing power*) yang seimbang dan harmoni. Karena negara kita menggunakan sistem demokrasi, maka berarti pembagian kekuasaan (*sharing power*) yang dimaksud adalah sesuai dengan kaidah demokrasi yaitu kepemimpinan (elit kekuasaan) yang menjalankan kekuasaaanya berdasar mandat dari rakyatnya.

Berikut adalah tulisan berjudul [Pemberdayaan](http://riadjohani.files.wordpress.com/2013/04/pemberdayaan.pdf) yang saya kembangkan dan gunakan sebagai bahan bacaan (*handouts*) dalam pelatihan untuk staf program pengembangan masyarakat. Sudah lawas (tahun 2003), namun masih tetap relevan dengan masih banyaknya program bertajuk Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia.

Istilah Pemberdayaan yang biasanya menjadi kosa kata kalangan organisasi non-pemerintah malah menjadi judul program andalan pemerintah sejak cikal bakal PNPM di awal reformasi sampai sekarang ini. Program ini barangkali merupakan program yang paling banyak memiliki Fasilitator Masyarakat karena memang sebuah program pemberdayaan membutuhkan proses-proses fasilitasi.

Seorang Fasilitator Masyarakat, tentu perlu memahami dan memiliki keterampilan untuk menjalankan kerja-kerja pemberdayaan masyarakat.

\*\*\*

Filed under [1a-Fasilitator Note](http://riadjohani.wordpress.com/category/1a-fasilitator-note/), [3a-Community Development](http://riadjohani.wordpress.com/category/3a-community-development/), [4a-Participatory Rural Appraisal](http://riadjohani.wordpress.com/category/4a-participatory-rural-appraisal/) and tagged [community development](http://riadjohani.wordpress.com/tag/community-development/), [Community Facilitator](http://riadjohani.wordpress.com/tag/community-facilitator/), [fasilitator masyarakat](http://riadjohani.wordpress.com/tag/fasilitator-masyarakat/), [Jim Ife](http://riadjohani.wordpress.com/tag/jim-ife/), [pengembangan masyarakat](http://riadjohani.wordpress.com/tag/pengembangan-masyarakat/), [Robert Chambers](http://riadjohani.wordpress.com/tag/robert-chambers/) | [Tinggalkan komentar](http://riadjohani.wordpress.com/2013/04/25/pemberdayaan-sebagai-kerja-fasilitator-masyarakat/#respond)

Feb7

[**Cerita Baik dan Sukses dari Lapangan**](http://riadjohani.wordpress.com/2013/02/07/cerita-baik-dan-sukses-dari-lapangan/)

Posted on [7 Februari 2013](http://riadjohani.wordpress.com/2013/02/07/cerita-baik-dan-sukses-dari-lapangan/) by [riadjohani](http://riadjohani.wordpress.com/author/riadjohani/)

[Standar](http://riadjohani.wordpress.com/tag/fasilitator-masyarakat/)

Sejak kecil kita belajar membaca, menulis dan berhitung di sekolah.  Membaca dan menulis dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Berhitung dalam pelajaran matematika. Sebenarnya, dalam materi Bahasa Indonesia ada juga pelajaran bertanya dan berbicara. Saya masih ingat di pelajaran Bahasa Indonesia sering ditugaskan mengarang cerita tentang liburan sekolah. Kemudian membacakan karangan di depan kelas. Tapi porsi belajar mengarang dan bercerita di depan kelas seperti itu kurang banyak dan semakin kurang di masa anak saya sekolah sekarang.  Namanya juga guru, lebih suka “menggurui”.

Karena seorang fasilitator itu bukan guru, tugasnya bukan “menggurui” tapi mengembangkan pertanyaan fasilitatif untuk belajar bersama petani atau masyarakat dampingan. Saya pernah menulis tentang “Teknik Bertanya: Sumber Ilmunya Darimana?”. Silakan baca di sini. <http://riadjohani.wordpress.com/2012/01/12/teknik-bertanya-ilmunya-darimana/>

Karena seorang yang banyak bertanya itu akan mendapatkan banyak tanggapan dan bahkan itu bisa merupakan sebuah proses komunikasi banyak arah, kemampuan mendengarkan (menyimak) juga perlu menjadi suatu latihan bagi para fasilitator. Saya juga memberi contoh tentang permainan “mendengarkan” (menyimak) di sini: <http://riadjohani.wordpress.com/2012/01/18/permainan-mendengarkan-dan-mengingat/>

Menuliskan catatan harian lapangan (*field diary*) atau catatan lapangan (*field notes*) atau jurnal lapangan, sebaiknya merupakan hal yang oleh lembaga dijadikan ketentuan “wajib” bagi para fasilitator masyarakat. Agar lama kelamaan menjadi kebiasaan atau keasyikan tersendiri. Menulis merupakan proses refleksi.

Refleksi merupakan perenungan nilai.

Seorang fasilitator masyarakat membutuhkan itu untuk bisa mengerti mengapa dirinya bekerja begitu keras di lapangan. Apalagi ketika menghadapi bermacam kesulitan, konflik, penolakan. Jawaban yang dicarinya hanya akan ada dalam wilayah nilai. Sebab kalau jawaban yang dicari adalah materi atau balas jasa, maka runtuhlah daya tahannya.

Saya pun meski bukan seorang fasilitator masyarakat, bekerja sebagai fasilitator di tingkat jaringan pembelajaran lembaga, mencari perenungan nilai ketika waktu berjalan terus, usia makin bertambah, dan orang-orang berjalan cepat meninggalkan kita untuk memperoleh pekerjaan yang merupakan peningkatan karier.

Saya akan tetap menjadi fasilitator “blusukan” sampai kapan pun.

\*\*\*

Itu sebuah prolog yang bertele-tele tentang pentingnya seorang fasilitator menulis (hehe). Saya menulis buku harian sejak kelas 4 SD sampai masa kuliah. Maklum saya dibesarkan di jaman manual. Kalau sekarang, anak saya sudah menulis blog sejak SD.

Menulis pakai tangan (manua)l merupakan hal yang menyenangkan buat saya sampai sekarang pun. Kebetulan tulisan tangan saya memang bagus.

Cara saya menulis buku harian tidak sebagai catatan kejadian tiap hari, tapi sebagai sebuah cerita yang dikembangkan dari kejadian yang saya alami. Ini butuh imajinasi. Jadi, menulis buku harian itu semacam latihan buat menulis.

Buku harian lapangan pun sebaiknya ditulis dengan cara mengembangkan cerita. Cerita bertemu dengan Ibu Aminah, pedagang bakul di Pasar Klewer yang sekarang jadi anggota BPD dan bahkan mau nyalon di Pilkades. Cerita harian pun bisa mencatatkan kilas balik (*flash back*) bagaimana awal pertemuan ‘aku” dengan Ibu Aminah di awal pendampingan, saat perempuan itu masih malu-malu kalau bicara dalam kelompok dampingan.

Sebuah catatan harian memang menuliskan kejadian nyata yang dicirikan dengan waktu (jam, tanggal, bulan dan tahun) kejadian. Saya suka menempelkan foto yang diambil pada waktu kejadian tersebut. Atau meninggalkan halaman kosong untuk menempelkan foto yang akan saya cari kemudian sesuai dengan peristiwa dan waktu kejadian.

Walau begitu, sebuah buku catatan harian yang sudah penuh terisi, untuk menjadi cerita yang dapat dibaca orang lain, perlu diolah dan dituliskan kembali.

\*\*\*

Bagaimana menuliskan cerita dari lapangan yang menarik untuk dibaca orang lain dan bermanfaat sesuatu pula?

Banyak sekali produk publikasi lembaga saya tentang teknologi hasil pendampingan program teman-teman LSM yang ditulis oleh para fasilitator lapangan. Memang, bisa saja fasilitator punya kecenderungan hanya menuliskan hal-hal teknis dari lapangan. Misalnya menuliskan kejadian dan keadaan dari sebuah kebun yang sedang dikembangkan, mulai dari awal sampai akhirnya menjadi kebun seperti yang direncanakan.

Menulis dan mengembangkan cerita yang disebut “human interest” seringkali tak terbayangkan oleh para fasilitator masyarakat yang bidangnya teknis. Tapi bisa saja didorong dan dianjurkan.

Saya mengenal sebuah LSM yang mendampingi kelompok usaha kecil perempuan memiliki tradisi ini. Setiap petugas lapangannya menuliskan catatan lapangan yang secara berkala dibaca dan dibahas bersama. Kemudian dipandu arah penulisan selanjutnya.

Pada akhirnya, lembaga itu menerbitkan buku yang berisi bunga rampai cerita lapangan yang ditulis oleh petugas lapangannya. Tema dan sudut pandang ceritanya sesuai dengan pilihan masing-masing.  Tapi karakter tulisannya lebih ke cerita “human interest”. Inspiratif sekali.

\*\*\*

Lembaga bisa menerbitkan buku-buku tentang teknologi pertanian, teknologi air bersih, pengembangan kesehatan primer, dan sebagainya, berdasarkan pengalaman lapangannya dalam sebuah kondisi dan tantangan tertentu.  Referensi semacam itu perlu untuk dibagi kepada lembaga dan program lain sejenis.

Lembaga juga bisa mencoba menerbitkan buku tentang aspek-aspek non-teknis dari pendampingan program yang bisa membuka cakrawala pikir yang lebih luas. Bercerita tentang sosok petani bukan dalam skala kebun tapi juga komunitasnya, bahkan lebih jauh kebijakan pemerintah dan kondisi politik lokal maupun nasional yang mempengaruhinya.

Berhubung yang menulis adalah para fasilitator masyarakat, buku bisa berupa bunga rampai tulisan dengan pilihan tema dan level analisis yang berbeda.

Tentang sebuah desa, kemiskinan, dan kehidupan para perempuannya.

Tentang si A, perempuan yang mencari nafkah dan menjadi tulang punggung keluarga.

Tentang manisnya buah yang dipetik fasilitator dari hasil pendampingan, setelah sebuah proses yang sulit karena konflik dengan masyarakat dan para “bapak” yang merasa terganggu dengan perempuan berorganisasi dan berkumpul-kumpul dalam program. Apalagi perempuan kemudian *kepengen* nyalon BPD.

Tentang Pemilu pertama pasca reformasi di Desa dampingan.

\*\*\*

Beberapa tahun terakhir, berkembang trend di kalangan program pembangunan untuk melakukan evaluasi dengan cara penulisan populer. Beberapa istilah yang muncul dalam evaluasi jenis ini adalah studi  “good practices” atau “best practices” atau “success story”. Apa saja wilayah “good practices” itu dan standar baiknya, dapat dirumuskan oleh lembaga program bersama para fasilitatornya, antara lain adanya tokoh pembaharu “champion actors” yang berkembang karena intervensi program atau keberadaaanya mendukung keberhasilan program intervensi lembaga.

Cerita human interest ini adalah cerita tentang atau dari pandangan orang atau sejumlah orang yang memperoleh manfaat dan atau terkena dampak program.  Ini dikembangkan dengan cara wawancara semi terstruktur kepada orang-orang tersebut. Teknik penulisan populer digunakan untuk menuliskan cerita-cerita human interest dari lapangan.

Penulisan praktek baik atau cerita sukses dikembangkan dengan menyusun berbagai topik tulisan yang terkait tujuan intervensi program dan merumuskan indikator baik atau suksesnya apa. Karakter tulisan success story adalah pembelajaran (*lesson learned*) mengenai suatu komponen dari program intervensi kita. Penulisan dikembangkan dengan cara mewawancari berbagai pihak mengenai topik-topik tersebut. Teknik penulisannya pun berupa tulisan populer. Praktik baik untuk “champion actors” dapat disusun berupa “profil” aktor tersebut (misalnya profil seorang petani inovatif), bisa juga berupa profil keluarga dan komunitas yang dianggap gambaran keberhasilan.

*Cerita human interest dan success story* kelihatannya sama saja dalam hasil tulisannya.  Keduanya dikembangkan untuk melengkapi evaluasi yang lebih bersifat data keras, supaya lebih enak dibaca dan “bersuara”, karena ada pernyataan (testimoni) dari orang dan cerita yang lebih menghidupkan gambaran proses dan hasil program daripada sekedar tabel data.

Kalau saja lembaga mengembangkan tradisi menulis catatan lapangan, maka evaluasi program pun akan menjadi lebih mudah untuk mengembangkan penulisan jenis ini.

Subyektivitas, “narsisme” (memuji-muji diri), dan istilah jaman sekarang sih “lebay-isme” (berlebih-lebihan) tentunya menjadi bahaya dari cara penulisan seperti ini.

\*\*\*

Saya menemukan modul serial pelatihan Monitoring dan Evaluasi di web LSM Internasional berikut:[www.crs.org](http://www.crs.org/)

Modul pertama sampai tujuh kurang cocok untuk LSM lokal karena lebih dikembangkan untuk LSM internasional dalam menggunakan jasa konsultan dan merancang program monitoring dan evaluasi (ME) programnya. Tapi modul ke delapan dan sembilan menarik untuk dijadikan referensi karena berisikan teknik penulisan human interest dan cerita keberhasilan (*success story*) dari lapangan untuk kebutuhan ME program.

Langkah-langkah dan contoh penulisan human interest dan cerita sukses untuk penulisan monitoring-evaluasi, dapat dilihat di sini:

[8-ME module\_humaninterest](http://riadjohani.files.wordpress.com/2013/02/8-me-module_humaninterest.pdf)

[9-ME module\_success stories](http://riadjohani.files.wordpress.com/2013/02/9-me-module_success-stories.pdf)

\*\*\*

Salah satu jenis materi lokakarya dan pelatihan yang pernah dikembangkan lembaga saya adalah pelatihan penulisan dokumentasi program.  Kami kesulitan untuk menemukan judul pelatihan yang cocok karena ternyata ragam tulisan yang ingin dibuat peserta sangat banyak, ada jenis tulisan “jurnalistik” seperti artikel, feature, dan berita kegiatan untuk media publikasi lembaga. Ada jenis tulisan dokumentasi program dari hasil evaluasi yang ingin disusun secara populer. Ada juga penulisan materi pendampingan dan pelatihan yang cenderung menjadi modul dan panduan fasilitator. Pelatihan penulisan ini harus disusun menjadi beberapa jenis pelatihan sesuai dengan kelompok atau jenis (genre) tulisan.

Teman saya yang berlatar belakang jurnalistik, mengembangkan materi teknik penulisan populer seperti artikel untuk buletin atau majalah lembaga, artikel web atau blog, penulisan buku yang merupakan kumpulan cerita dari lapangan. Pelatihan jenis ini disebut lokakarya dan pelatihan, karena setiap peserta langsung bekerja dengan proyek penulisannya masing-masing, sedangkan dari aspek pelatihannya diberikan materi teknik dan tips pengembangan tulisan (mulai dari memahami karakter setiap jenis tulisan, mengembangkan brief tulisan, outline tulisan, dan menulis sesuai dengan karakter dan khalayak sasaran yang dimaksud).

Lokalatih semacam itu sebaiknya diselenggarakan oleh lembaga sendiri untuk para fasilitator atau petugas lapangannya. Bisa juga dengan melibatkan fasilitator atau CO lokal. Ini juga merupakan bentuk penghargaan terhadap kerja fasilitator dengan menjadikan penulisan pengalaman lapangan dan pemikiran mereka sebagai agenda penting lembaga.

\*\*\*

Filed under [1a-Fasilitator Note](http://riadjohani.wordpress.com/category/1a-fasilitator-note/), [3a-Community Development](http://riadjohani.wordpress.com/category/3a-community-development/) and tagged [community development](http://riadjohani.wordpress.com/tag/community-development/), [evaluasi](http://riadjohani.wordpress.com/tag/evaluasi/), [fasilitator masyarakat](http://riadjohani.wordpress.com/tag/fasilitator-masyarakat/), [field notes](http://riadjohani.wordpress.com/tag/field-notes/), [good practicess](http://riadjohani.wordpress.com/tag/good-practicess/), [pelatihan penulisan](http://riadjohani.wordpress.com/tag/pelatihan-penulisan/), [success story](http://riadjohani.wordpress.com/tag/success-story/) | [Tinggalkan komentar](http://riadjohani.wordpress.com/2013/02/07/cerita-baik-dan-sukses-dari-lapangan/#respond)

Feb6

[**PRA – penerapannya dalam daur program**](http://riadjohani.wordpress.com/2013/02/06/pra-penerapannya-dalam-daur-program/)

Posted on [6 Februari 2013](http://riadjohani.wordpress.com/2013/02/06/pra-penerapannya-dalam-daur-program/) by [riadjohani](http://riadjohani.wordpress.com/author/riadjohani/)

[Standar](http://riadjohani.wordpress.com/tag/fasilitator-masyarakat/)

*Participatory Rural Appraisal* (PRA) bisa diterapkan sebagai metodologi program, bisa juga menjadi operasionalisasi dari ideologi pembebasan, bisa juga hanya teknik/alat diskusi atau menggali informasi, dan bisa juga menjadi teknik/alat manajemen program. Saya lebih suka bila PRA itu bersifat ideologis dan lebih kuat ketimbang popularitas teknik/alatnya.

Namun, dalam kenyataannya PRA lebih populer sebagai teknik/alat pengelolaan program partisipatif. Ideologi pembebasan berubah menjadi pemberdayaan (empowerment) yang lebih “soft”.  Bukan tindakan dan perlawanan untuk mengubah struktur penindasan, tapi memberi keterampilan kerja dan meningkatkan modal, ketimbang memperkuat organisasi dan kepemimpinan lokal yang bisa memperbaiki posisi tawar petani terhadap kekuasaan.

Pendidikan kritis yang digunakan pengguna PRA menjadi pembelajaran yang lebih praktis, meningkatkan hasil kebun dengan memperbaiki teknologi, misalnya. Bukan belajar memahami struktur penindasan yang menyebabkan pemiskinan.

\*\*\*

PRA di kalangan LSM pengembangan masyarakat dilakukan untuk mengembangkan daur program partisipatif. Daur program sering diibaratkan sebagai sebuah “spiral” ketimbang lingkaran. Spiral terdiri dari lingkaran-lingkaran yang terus berulang.

Penerapan PRA dalam daur program terdiri dari:

* Tahap penjajakan kebutuhan (need assessment):  PRA untuk pengkajian partisipatif dengan menggunakan berbagai metode/tekniknya;
* Tahap perencanaan: seringkali disebut PRA yang dikombinasikan dengan ZOPP, sebuah metode perencanaan yang populer di Indonesia, berasal dari GTZ Jerman.
* Tahap pelaksanaan kegiatan: PRA dan metode/tekniknya digunakan sebagai pendekatan, prinsip maupun teknik/alat pendampingan masyarakat oleh para petugas lapangan (PL) atau fasilitator masyarakat (community facilitator).
* Tahap monev: perkembangan atau penilaian pencapaian program dilakukan secara partisipatif dengan memodifikasi metode/tekniknya untuk menganalisis perubahan keadaan sebagai akibat dari kegiatan intervensi yang dilakukan.

\*\*\*

Seluruh tahapan tersebut diibaratkan sebagai lingkaran, dan karena dilakukan berulang-ulang maka menjadi sebuah spiral. Biasanya LSM pengembangan masyarakat melakukan kegiatan yang disebut evaluasi dan perencanaan tahunan dengan memasukkan kegiatan analisis masalah (atau SWOT) sebagai bahan untuk menilai dan memperbaiki perkembangan program.

Itu sebabnya semua tahap di atas sesungguhnya terjadi berulang-ulang karena sebuah program intervensi dijalankan dalam jangka waktu beberapa tahun.

\*\*\*

Pada evaluasi dampak adopsi PRA selama hampir 10 tahun di kalangan mitra jaringan Nusa Tenggara, tulisan-tulisan berikut ditulis untuk mengekstrasi bagaimana penerapan PRA dalam daur program pengembangan masyarakat.

[9-PRA-penjajakan-kebutuhan](http://riadjohani.files.wordpress.com/2013/02/9-pra-penjajakan-kebutuhan.pdf)

[10-PRA-perencanaan-program](http://riadjohani.files.wordpress.com/2013/02/10-pra-perencanaan-program.pdf)

[11-PRA-pendampingan masyarakat](http://riadjohani.files.wordpress.com/2013/02/11-pra-pendampingan-masyarakat.pdf)

[12-PRA-monev](http://riadjohani.files.wordpress.com/2013/02/12-pra-monev.pdf)

\*\*\*

Rasanya sih perkembangan PRA di Indonesia memang sudah kadung begitu. PRA itu populer untuk mengembangkan proses program partisipatif. Instrumentalis.

Rasanya memang betul ucapan seorang aktivist Indonesia yang mengatakan: “PRA itu tidak punya ideologi…” Hmmm, padahal salah satu yang menginspirasi perkembangan PRA itu ideologi pembebasan Paulo Freire.

Kalau di negara lain seperti apa ya?

\*\*\*

Filed under [3a-Community Development](http://riadjohani.wordpress.com/category/3a-community-development/), [4a-Participatory Rural Appraisal](http://riadjohani.wordpress.com/category/4a-participatory-rural-appraisal/) and tagged [community development](http://riadjohani.wordpress.com/tag/community-development/), [Community Facilitator](http://riadjohani.wordpress.com/tag/community-facilitator/), [fasilitator masyarakat](http://riadjohani.wordpress.com/tag/fasilitator-masyarakat/), [Participatory Rural Appraisal](http://riadjohani.wordpress.com/tag/participatory-rural-appraisal/) | [Tinggalkan komentar](http://riadjohani.wordpress.com/2013/02/06/pra-penerapannya-dalam-daur-program/#respond)

Feb6

[**PRA – bukan sekedar metode/teknik**](http://riadjohani.wordpress.com/2013/02/06/participatory-rural-appraisal-bukan-sekedar-metodeteknik/)

Posted on [6 Februari 2013](http://riadjohani.wordpress.com/2013/02/06/participatory-rural-appraisal-bukan-sekedar-metodeteknik/) by [riadjohani](http://riadjohani.wordpress.com/author/riadjohani/)

[Standar](http://riadjohani.wordpress.com/tag/fasilitator-masyarakat/)

Salah satu ciri metode Participatory Rural Appraisal (PRA) adalah  memiliki kumpulan teknik atau alat kajian yang bersifat visual (gambar).

Tulisan tentang PRA, dapat dibaca [di sini](http://riadjohani.wordpress.com/2012/03/31/participatory-rural-appraisal-apa-dan-mengapa-3/), [di sini](http://riadjohani.wordpress.com/2012/03/31/buku-yang-mendokumentasikan-pengalaman-pra-di-indonesia/) dan [di sini](http://riadjohani.wordpress.com/2011/11/22/participatory-rural-appraisal-di-permendagri-662007/).

Gambar visual dari teknik/alat PRA ini nampaknya sederhana, dibuat secara manual bersama masyarakat, namun memiliki sesuatu yang mengagumkan berdasarkan.Gambar visual itu bisa memotret sebuah sistem yang kecil maupun cukup besar sehingga dapat menghasilkan sebuah diskusi yang “powerfull”.

Alur sejarah bisa menjadi sebuah “story telling” tentang keberadaan sebuah komunitas, keberagaman etnis dan kelompok atau sebaliknya homogenitasnya, nilai-nilai hidup tentang alam, kehidupan sosial, dan agama/kepercayaan.  Masuknya nilai-nilai baru ke dalam masyarakat dan tanggapan mereka.  Kepercayaan diri atau sebaliknya runtuhnya kepercayaan diri masyarakat, pengaruh atau runtuhnya pengaruh kepemimpinan lokal.

Semua itu seringkali menjadi diskusi yang mengharu biru buat saya.

Sketsa/gambar desa menggambarkan keberadaan komunitas itu. Apa yang mereka miliki dari masa lalu. Apa yang mereka tidak miliki dan bercokol di wilayah mereka tanpa diundang, perusahaan pemilik HPH, misalnya.  Sebuah LSM Internasional memiliki program pengelolaan konflik manusia dengan binatang yang mengepung perkampungan sehingga melakukan pemindahan hewan ke tempat yang lebih aman, terutama gajah.

Saya sungguh takjub ketika masyarakat menggambarkan sketsa/gambar desa dan wilayah hutannya, termasuk lokasi-lokasi konflik tersebut: gajah, harimau, dan beruang. Sedangkan babi hutan dan kera lebih dianggap hewan yang menjadi hama.

Ada hal-hal yang disembunyikan masyarakat kepada saya bila melakukan diskusi dengan teknik/alat PRA. Tapi itu wajar, saya hanya seorang “tamu” yang hadir sebentar. Kawan-kawan pendamping masyarakat dari LSM setempat lah yang akan bersama mereka lebih lama.

Kepercayaan itu perlu waktu dan hanya tumbuh kepada seorang fasilitator yang tulus bekerja untuk masyarakat .

Ketika PRA menjadi trend metodologi pendekatan program, teknik/alat ini seringkali digunakan secara instan. Tidak memberikan makna yang berarti bagi fasilitator itu sendiri maupun masyarakat. Hanya sekedar melakukan tugas menggali data/informasi atas tugas dari sebuah program.

Teknik/alat PRA hanya akan menjadi “powerfull” bila digunakan seorang yang tepat. Seorang yang mencintai pekerjaan kemasyarakatan. Seorang yang memberikan hatinya untuk menjadi fasilitator masyarakat.

\*\*\*

Terdapat banyak teknik/alat PRA, dan ini bisa dikembangkan dan dimodifikasi oleh fasilitator masyarakat agar memperoleh teknik/alat diskusi yang tepat dengan kebutuhannya dalam bekerja.

Bagi yang baru berkenalan dengan teknik/alat PRA, daftar berikut ini bisa menjadi awal untuk mulai mencoba dan menerapkannya.  Supaya mudah mengingat dan memahami teknik/alat PRA, pelajari dengan cara berikut:

* Perhatikan gambar visual teknik/alat PRA tersebut dan apa saja muatan informasi di dalamnya.
* Perhatikan ciri dari teknik/alat PRA tersebut menurut pengelompokkan yang dijelaskan di bawah ini.
* Pelajari cara analisis informasi yang terdapat dalam teknik/alat PRA tersebut seperti apa: apakah deskripsi kejadian, apakah kronologi kejadian, apakah pemberian urutan (skor) berdasarkan kriteria tertentu. Lihat tabel mengenai cara analisis informasi dengan metode PRA di bawah.
* Pelajari cara melakukan diskusi dengan menggunakan teknik/alat PRA. Proses diskusi PRA diibaratkan sebagai piramida terbalik, semakin fokus, semakin mendalam, tapi tak perlu dipaksakan batasannya. Proses ini mengalir saja bersama masyarakat, sampai masyarakat melakukan penemuan-penemuan mengenai siapa dirinya dan apa tanggapannya.
* Kembangkan tujuan, ruang lingkup informasi, dan modifikasi teknik yang dirasakan lebih cocok untuk kebutuhan diskusi Anda.

Silakan baca lebih lanjut beberapa materi berikut ini:

[6-Metode-teknik PRA](http://riadjohani.files.wordpress.com/2013/02/6-metode-teknik-pra.pdf)

[7-Analisa Informasi PRA](http://riadjohani.files.wordpress.com/2013/02/7-analisa-informasi-pra.pdf)

[8-Teknik Fasilitasi PRA](http://riadjohani.files.wordpress.com/2013/02/8-teknik-fasilitasi-pra.pdf)

\*\*\*

Karena teknik/alat PRA bisa menjadi daftar yang banyak dan bertambah terus, kita bisa membuat pengelompokkan teknik/alat PRA tersebut supaya mudah mengingatnya. Salah satu cara mengelompokkannya adalah sebagai berikut.

1. Kelompok metode/teknik yang memiliki ciri “waktu” (when/kapan):

* Alur Sejarah (History Line)
* Kalender Musim (Seasonal Calendar)
* Kecenderungan dan Perubahan (Trend and Change)
* Jadwal Sehari  (Daily Schedule)

2. Kelompok metode/teknik yang memiliki ciri “tempat/ruang” (where/dimana):

* Sketsa Peta Wilayah (Desa)
* Bagan Transek
* Sketsa Kebun

3. Kelompok metode/teknik yang memiliki ciri “siapa pelakunya” (who):

* Diagram Venn: Pelaku lembaga dan kepemimpinan lokal
* Analisis gender: Pelaku L, P, L/P
  + Matriks Analisis Keputusan: Siapa pembuat keputusan di keluarga
  + Jadwal Sehari: Siapa melakukan tugas apa
  + Sketsa Peta Desa:  Siapa memiliki akses dan kontrol SDA
  + Diagram Venn: Siapa berpartisipasi di lembaga publik

4. Kelompok metode/teknik yang memiliki ciri “apa saja” (what):

* Analisis Matapencaharian
* Pengumpulan dan Pengelompokkan Masalah

5. Kelompok metode/teknik yang memiliki ciri “proses/alur” (how/bagaimana):

* Bagan Alur Pemasaran Hasil Pertanian
* Bagan Alur Usaha Pertanian

6. Kelompok metode/teknik yang memiliki ciri “sebab -akibat” (why/mengapa):

* Matriks Ranking (Skoring) Komoditi Unggulan
* Bagan Alur Sebab-akibat Masalah

7. Analisis masalah (bisa diganti dengan analisis potensi) digunakan teknik:

* Pengumpulan dan Pengelompokkan Masalah
* Analisis Sebab-akibat Masalah
* Matriks Ranking (Skoring) Masalah

\*\*\*

Seorang fasilitator masyarakat yang menggunakan teknik/alat PRA perlu mempercayai bahwa dirinya tidak lebih pintar dari masyarakat hanya karena punya ijasah sekolah. Apalagi hanya karena dirinya belajar dari buku-buku, sedangkan masyarakat jarang membaca atau tidak pernah membaca buku, bahkan buta huruf.

Banyak masyarakat yang bisa membaca tapi bukan dengan tujuan belajar.  Bisa membaca surat atau SMS. Tapi tradisi belajar masyarakat biasanya adalah lisan dan magang. Ilmu masyarakat ada dalam praktek di lapangan. Pertukaran pengetahuan masyarakat terjadi dalam keluarga, di warung kopi, tempat ibadah, atau tempat berkumpul lain.

Teknik/alat PRA mengajak masyarakat melakukan pembelajaran dengan menggunakan sesuatu yang digambarkan/dituliskan/disimbolkan di atas sebuah media (kertas, papan tulis, tanah). Karena itu teknik/alat tersebut hanyalah sarana agar diskusi lisan yang biasanya *ngalor-ngidul* punya topik tertentu.

Tugas fasilitator adalah menggali kapasitas belajar masyarakat. Berlatih berdiskusi secara baik dengan cara analisis yang biasa saja dilakukan kita setiap hari. Cara analisis dengan metode/teknik PRA adalah sebagai berikut:

| **CARA ANALISA** | **CONTOH – CONTOH** |
| --- | --- |
| **Memberi nama (*naming*) sesuatu** | Memberi nama untuk setiap langkah/kegiatan mengelola kebun, misalnya istilah lokal. Contoh di Timor: pembukaan lahan (*tafek nono hau ane*), membakar lahan (*polo nopo*), upacara minta hujan (*tsifo nopo*), penanaman, pembersihan lahan (*tofa*), panen, pesta panen (*thai niki bolaif*). Memberi nama untuk suatu benda. Misalnya: lopo (balai pertemuan); dsb. |
| **Mendaftarkan (*listing*) atau mengumpulkan (*collecting*)** | Mendaftarkan jenis-jenis komoditi yang dikembangkan petani;  Mendaftarkan jenis-jenis kegiatan pengelolaan kebun;  Mendaftarkan masalah-masalah yang muncul dalam pengelolaan usaha masyarakat;  Mendaftarkan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat; dsb. |
| **Memberi nilai (*scoring*)** | Memberi nilai 1 – 10 untuk membandingkan keunggulan sejumlah komiditi (matriks ranking komoditi);  Memberi nilai 1 – 10 untuk menilai bobot sejumlah masalah yang dirasakan masyarakat (matriks prioritas masalah);  Memberi nilai 1 – 10 untuk membandingkan jumlah kepemilikan lahan/ternak/kekayaan (*wealth ranking*); dsb. |
| **Mengurutkan (*sequencing*)** | Mengurutkan komoditi berdasarkan nilai keunggulannya;  Mengurutkan kegiatan berdasarkan tahap-tahapnya;  Mengurutkan kejadian berdasarkan kronologi waktu; dsb. |
| **Membandingkan (*comparing*)** | Membandingkan keunggulan sejumlah komoditi berdasarkan sejumlah kriteria;  Membandingkan beban kerja perempuan dengan laki-laki;  Membandingkan pendapatan dengan pengeluaran; dsb. |
| **Menghitung (*counting*) dan mengukur** | Menghitung jumlah ternak, luas kebun;  Menghitung jumlah/berat hasil produksi kebun (bisa menggunakan ukuran lokal);  Menghitung jumlah pendapatan; dsb. |
| **Mengkaitkan/ menghubungkan (*linking/relating*)** | Setelah mengumpulkan masalah-masalah, kemudian menganalisa hubungan sebab-akibat masalah;  Menghubungkan antara kegiatan atau keadaan dengan musim;  Menghubungkan masa lalu, masa kini, dengan masa depan;  Mengkaitkan antara tingkat produktivitas kebun dengan faktor-faktor lain (pola tanam, teknologi); dsb. |
| **Memperkirakan (*estimating*)** | Memperkirakan tingkat produksi dari tahun ke tahun (menggunakan skore 1 – 10);  Memperkirakan kecenderungan perubahan ke depan;  Memperkirakan penggolongan kekayaan masyarakat dengan kriteria-kriteria tertentu (misalnya: kepemilikan lahan dan ternak, jenis rumah, dsb.); dsb. |
| **Memilih atau menseleksi (*sorting*)** | Memberi nilai untuk memilih komoditi unggulan;  Membandingkan sejumlah komoditi dengan sejumlah kriteria penilaian untuk memilih komoditi unggulan;  Memilih prioritas masalah untuk dijadikan kegiatan; dsb. |
| **Menceritakan (*telling*) atau menggambarkan (*describing*)** | Menceritakan kejadian-kejadian, menceritakan pengalaman;  Menggambarkan suatu permasalahan;  Menggambarkan kondisi sumberdaya alam di suatu wilayah;  Menggambarkan perekonomian desa; dsb. |
| **Membuat diagram (*diagraming*)** | Mengurutkan kegiatan/kejadian berdasarkan tahap-tahapnya menjadi alur proses (misal: bagan alur produksi-pemasaran);  Menggambarkan pola hubungan keterkaitan (misal: diagram kelembagaan, bagan sistem usaha pertanian, pohon masalah);  Membandingkan jumlah/volume berbagai kegiatan/keadaan (diagram batang, diagram kue, dsb.) dsb. |
| **Membuat model (*modelling*)** | Menggambar desa/kebun, atau membuat maket (model 3 dimensi) desa/kebun; dsb. |

\*\*\*

Berdiskusi dengan masyarakat selalu kekurangan waktu. Obrolan sering berkembang kemana-mana, tapi itulah nikmatnya kerja pendampingan masyarakat. Padahal masyarakat juga punya kesibukan dengan pekerjaannya.  Bila fasilitator masyarakat bekerja dan hidup di masyarakat (*live-in*), batasan waktu untuk melakukan diskusi disesuaikan dengan kondisi lapangan.

Diskusi dilakukan dalam suasana informal. Secara umum, teknik fasilitasi kajian dengan alat PRA adalah sebagai berikut:

* Membuka pertemuan dengan menyampaikan topik dan tujuan diskusi.
* Mengembangkan pertanyaan-pertanyaan pembuka untuk mengawali diskusi tentu saja yang relevan dengan topik dan tujuan diskusi.
* Menjelaskan cara mengembangkan visualisasi (gambar) dan maksud dari penggunaan visualisasi (gambar). Menyepakati simbol-simbol gambar.
* Mendampingi masyarakat untuk membuat visualisasi, membantu mereka mengembangkannya pada tahap awal, bertahap membiarkan mereka menyelesaikan visualisasi secara bersama (saling membantu).
* Menampilkan visualisasi yang telah diselesaikan oleh masyarakat, dan memfasilitasi analisis keadaan yang ditampilkan dalam visualisasi (gambar) tersebut.  Fasilitator harus sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan penolong analisis yang bisa mengembangkan diskusi.
* Secara bertahap, membiarkan masyarakat mengembangkan diskusi analisis mereka mengenai keadaan yang ada dalam visualisasi (gambar) tersebut.
* Fasilitator menutup diskusi dengan meminta peserta untuk merumuskan pokok-pokok pelajaran yang diperoleh dalam diskusi.

\*\*\*

Dokumentasi hasil PRA seringkali berupa laporan karena kegiatan PRA dianggap sebagai sebuah kegiatan (event) dalam batasan waktu tertentu. Ini karena PRA sebagai metode  pendekatan program digunakan sebagai metode/teknik manajemen program yang punya ketentuan dan batasan secara administrasi.

Sebagai sebuah metodologi dan prinsip, PRA dilakukan dalam proses pendampingan. Format pendokumentasian yang cocok adalah dalam bentuk catatan lapangan (field notes). Seorang pendamping masyarakat memiliki buku harian atau jurnal lapangan.

Tantangan tersendiri karena fasilitator masyarakat pun tidak memiliki kebiasaan menulis. Apalagi kalau berlatar belakang teknis (pertanian, teknologi poerdesaan), sering merasa menulis itu sebagai sesuatu yang sulit.

Ini juga tergantung dari tradisi belajar di organisasi asal dari fasilitator masyarakat itu. Mudah sekali memahami apakah sebuah organisasi memiliki tradisi belajar atau tidak, dan apakah lisan atau juga menulis.

\*\*\*

Organisasi tanpa diskusi, jelas tidak memiliki tradisi pembelajaran. Organisasi tanpa produk tertulis pembelajaran dari para fasilitatornya dan hanya menghasilkan laporan-laporan administrasi program,  mencirikan organisasi yang tidak menggembleng pembelajaran agar jajaran personilnya punya sikap keberpihakan yang menjadi nilai organisasinya.  Jelas lembaga ini basis kerjanya hanya proyek.

Aktivis yang tidak banyak diskusi dan membaca untuk mencari alternatif pemahaman,  juga tidak menuliskan penjelajahannya untuk mengkoreksi dan memperbaiki,  jelas hanya menjalankan aktivisme.

Aktivisme itu semacam suatu kelinglungan.

PRA akan “powerfull” untuk lembaga dan aktivis yang menyukai pembelajaran, refleksi dan pencarian nilai. Penulisan merupakan alat (sarana) yang penting untuk melakukan refleksi dan koreksi.

Organisasi perlu memfasilitasi agar catatan lapangan itu menjadi hal yang bernilai di organisasinya. Hal yang penting. Dihargai sangat tinggi.

Pada era sekarang, format catatan lapangan bisa berupa blog individu.

\*\*\*

Filed under [3a-Community Development](http://riadjohani.wordpress.com/category/3a-community-development/), [4a-Participatory Rural Appraisal](http://riadjohani.wordpress.com/category/4a-participatory-rural-appraisal/) and tagged [community development](http://riadjohani.wordpress.com/tag/community-development/), [fasilitator masyarakat](http://riadjohani.wordpress.com/tag/fasilitator-masyarakat/), [Participatory Rural Appraisal](http://riadjohani.wordpress.com/tag/participatory-rural-appraisal/), [Teknik Fasilitasi](http://riadjohani.wordpress.com/tag/teknik-fasilitasi/) | [1 Komentar](http://riadjohani.wordpress.com/2013/02/06/participatory-rural-appraisal-bukan-sekedar-metodeteknik/#comments)

Feb4

[**Fasilitator Sudah Resmi Menjadi Sebuah Profesi**](http://riadjohani.wordpress.com/2013/02/04/fasilitator-sudah-resmi-menjadi-sebuah-profesi/)

Posted on [4 Februari 2013](http://riadjohani.wordpress.com/2013/02/04/fasilitator-sudah-resmi-menjadi-sebuah-profesi/) by [riadjohani](http://riadjohani.wordpress.com/author/riadjohani/)

[Standar](http://riadjohani.wordpress.com/tag/fasilitator-masyarakat/)

Lembaga Sertifikasi Profesi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat (LSP – FPM) saat ini sudah dibentuk dan sedang melakukan proses penyiapan kelembagaan dan perangkatnya untuk bisa menjalankan sertifikasi fasilitator. Terbentuknya LSP-FPM yang diakreditasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan dikeluarkannya dokumen **Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat** (SKKNI FPM) yang diterbitkan sebagai Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012, menunjukkan bahwa profesi fasilitator sudah secara resmi dicanangkan di Indonesia.

Apa itu SLP-FPM? Untuk berkenalan dengan lembaga ini silakan mampir ke [http://www.lsp-fpm.or.id](http://www.lsp-fpm.or.id/)  dan [www.facebook.com/LSP.FPM](http://www.facebook.com/LSP.FPM)

**\*\*\***

**Ragam Fasilitator sebagai Profesi**

Salah satu syarat berdirinya LSP-FPM adalah pembuatan skema sertifikasi apa yang akan menjadi layanan lembaga ini. Ini merupakan perdebatan yang panjang karena apa yang disebut sebagai fasilitator di Indonesia bukan hanya mereka yang bekerja di masyarakat (dalam pengertian desa dan kelurahan), tetapi juga bekerja di tingkat jaringan (kabupaten/kota, propinsi, dan nasional).

Karena itu ragam atau jenis fasilitator itu bisa disusun secara berjenjang, mulai dari fasilitator masyarakat sampai ke fasilitator tingkat jaringan (kabupaten/kota, propinsi, dan nasional), maupun menyamping berdasarkan suatu keahlian tertentu (fasilitator pertanian, fasilitator sosial, fasilitator insfrastruktur desa, fasilitator kesehatan masyarakat, fasilitator Penanggulangan Bencana, dsb.) yang masih belum disusun bagaimana ragam fasilitator sebagai profesi itu akan dikembangkan selanjutnya.

Untuk saat ini, LSP-FPM menerbitkan baru satu jenis sertifikasi bagi fasilitator yang langsung bekerja di masyarakat dengan ruang lingkup kompetensi yang dirumuskan dalam dokumen **Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat** (SKKNI FPM).

Dokumen SKKNI FPM dapat Anda unduh [di sini](http://www.lsp-fpm.or.id/index.php?page=content&id=15).

LSP FPM kemudian menerbitkan dokumen yang disebut Skema Sertifikasi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat yang dapat Anda unduh [di sini](http://www.lsp-fpm.or.id/index.php?page=content&id=10).

**\*\*\***

**Posisi Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)**

Pada tulisan sebelumnya, saya menyebutkan bahwa salah satu dasar pengembangan sertifikasi fasilitator adalah Permendagri No.7 tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat yang mewajibkan desa/kelurahan memiliki Kader Pemberdayaan Masyarakat atau KPM (istilah lain untuk fasilitator masyarakat) bersertifikat.

(Baca: [Sertifikasi Fasilitator: Kenapa?](http://riadjohani.wordpress.com/2011/12/01/sertifikasi-fasilitator-kenapa/))

Ternyata pemikiran awal itu berkembang dan pembentukan LSP-FPM yang sekarang ini sudah tidak lagi hanya berbicara tentang fasilitator di tingkat masyarakat. Meskipun saat ini LSP-FPM baru memiliki skema sertifikasi untuk fasilitator masyarakat, namun ke depannya juga LSP-FPM akan mengeluarkan sertifikasi bagi berbagai jenis fasilitator lain.

Lalu, bagaimana posisi KPM? KPM adalah relawan dari kalangan masyarakat yang mungkin bisa (tetapi saat ini muskil) untuk bisa menjadi FPM. Mengapa? Karena untuk menjadi FPM, berarti harus mengikuti uji kompetensi yang diadakan oleh LSP-FPM dengan sejumlah persyaratan yang sulit dipenuhi para fasilitator masyarakat terutama bagi masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah. Syarat pendidikan formal minimal adalah SLTA harus ditambah pengalaman 7 tahun dan materi uji yang hanya bisa dikuasai bila KPM dapat memperoleh pelatihan sebanyak itu dari pihak luar. Apalagi biaya mengikuti sertifikasi itu total Rp 2.100.000 (Rp 100.000 biaya formulir/pendaftaran, Rp 2.000.000 biaya ujikompetensi sampai terbit sertifikat), sebuah jumlah yang mahal bagi masyarakat, bahkan juga bagi fasilitator lembaga yang bergaji.

Persyaratan dan biaya mengikuti ujikompetensi FPM dapat dibaca [di sini.](http://www.lsp-fpm.or.id/index.php?page=content&id=13)

**\*\*\***

**Kalau Begitu, FPM adalah “Orang Luar”?**

“Orang luar” artinya bukan anggota masyarakat, dan fasilitator masyarakat sering dibedakan antara yang “orang luar” dengan “orang dalam”. Kalangan LSM sering mnyebut fasilitator yang merupakan “orang dalam” sebagai CO lokal (community organizer) atau fasilitator lokal atau kader penggerak. Para fasilitator atau CO lokal ini biasanya bekerja secara sukarelawan untuk kepentingan masyarakatnya sendiri.

Sedangkan fasilitator masyarakat yang berasal dari luar masyarakat, ditempatkan oleh sebuah lembaga untuk mendampingi sebuah masyarakat. Fasilitator luar ini mendapat insentif dari lembaganya untuk bekerja sebagai fasilitator.

Benar, yang dimaksud sebagai FPM adalah “orang luar”, bukan fasilitator atau CO lokal yang berasal dari masyarakat dan bekerja sebagai pengabdian (relawan). KPM, Kader Posyandu, Karang Taruna, dan berbagai kader dari kalangan masyarakat, nampaknya muskil untuk menjadi fasilitator profesional bersertifikat dan memperoleh sebutan FPM.

**\*\*\***

**Sisi Positif Sertifikasi**

Sisi positif sertifikasi bagi kepentingan masyarakat adalah masyarakat memperoleh pendampingan dari FPM yang memiliki kompetensi yang teruji bila lembaga program (pemerintah maupun non-pemerintah) masuk ke wilayahnya.

Sedangkan bagi para fasilitator sendiri, sertifikasi diharapkan memberikan jaminan masa depan dari kerja-kerja mereka yang cukup lama karena tersedia jenjang karier profesi ini, juga diharapkan terdapat standar gaji dan jaminan kesejahteraan yang lebih baik.

Sisi positif bagi pengguna jasa fasilitator (lembaga pemerintah, organisasi sosial, perusahaan yang memiliki program CSR) tentunya adalah jaminan ketersediaan tenaga kerja yang baik (profesional) untuk menjalankan program mereka yang ditujukan untukpemberdayaan masyarakat.

Sisi negatif sertifikasi adalah bila sisi positif di atas tidak dapat dilakukan karena sertifikasi ini dijalankan hanya sekedar sebagai “bisnis” menjual jasa sertifikasi tanpa adanya komitmen pengabdian kepada masyarakat. Supaya mudah dipahami, ibaratkan saja dengan membuat SIM motor atau mobil, jangan sampai ada jalur tak resmi ( SIM tembak) yang harganya mahal tanpa dilakukan ujian yang benar.

Karena saya sempat berkenalan dengan para pengurus LSP-FPM, saya rasa sertifikasi ini akan memberikan kontribusi positif bagi program-program yang membutuhkan para fasilitator handal sebagai ujung tombaknya.

**\*\*\***

**Penyedia Layanan Sertifikasi**

LSP-FPM berkantor di Jakarta sehingga tidak mungkin menyediakan layanan sertifikasi tanpa membuka tempat di berbagai wilayah Indonesia. LSP FPM bekerjasama dengan berbagai lembaga yang akan menyelenggarakan Tempat Uji Kompetensi (TUP) sebagai perpanjangan tangan LSP FPM.

Untuk mengetahui apakah TUK sudah ada di daerah Anda, silakan saja klik [di sini.](http://www.lsp-fpm.or.id/index.php?page=content&id=18)

Saat ini, belum banyak TUK yang terbentuk karena masih tahap permulaan. Kalau lembaga Anda berminat, silakan mengajukan kepada LSP-FPM untuk menjadi TUK di daerah Anda.

**\*\*\***

Filed under [1a-Fasilitator Note](http://riadjohani.wordpress.com/category/1a-fasilitator-note/) and tagged [fasilitator masyarakat](http://riadjohani.wordpress.com/tag/fasilitator-masyarakat/), [LSP-FPM](http://riadjohani.wordpress.com/tag/lsp-fpm/), [pembangunan](http://riadjohani.wordpress.com/tag/pembangunan/), [sertifikasi fasilitator](http://riadjohani.wordpress.com/tag/sertifikasi-fasilitator/) | [Tinggalkan komentar](http://riadjohani.wordpress.com/2013/02/04/fasilitator-sudah-resmi-menjadi-sebuah-profesi/#respond)

Mei7

[**GENDER sebuah istilah yang sulit dikomunikasikan**](http://riadjohani.wordpress.com/2012/05/07/gender-sebuah-istilah-yang-sulit-dikomunikasikan-2/)

Posted on [7 Mei 2012](http://riadjohani.wordpress.com/2012/05/07/gender-sebuah-istilah-yang-sulit-dikomunikasikan-2/) by [riadjohani](http://riadjohani.wordpress.com/author/riadjohani/)

[Standar](http://riadjohani.wordpress.com/tag/fasilitator-masyarakat/)

Pertama kali mengenal istilah gender atau jender pada tahun 1994 ketika sedang menyunting buku PRA [“Berbuat Bersama Berperan Setara”](http://riadjohani.wordpress.com/2012/03/31/buku-yang-mendokumentasikan-pengalaman-pra-di-indonesia).

Senang juga mendapatkan istilah untuk menamakan berbagai hal yang secara pribadi saya alami, baik di keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat.

Apa tuh gender?

Perempuan itu begini begitu, menurut nilai-nilai sosial-budaya dan agama di suatu masyarakat. Sedangkan lelaki itu begitu begini. Berarti, gender itu jenis kelamin sosial ya. Itu istilah yang saya suka.

Ketika nilai-nilai gender menjadikan perempuan didiskriminasikan, itu menjadi ketidakadilan gender. Ketika perempuan menjadi manusia kelas dua, itu menjadi ketimpangan gender.

Oooooooh, itu gender toh istilahnya….

\*\*\*

Sejak saat itu, saya bisa memperhatikan di sekeliling saya tentang masalah gender, ketimpangan gender, ketidakadilan gender. Nyata adanya. Bukan teori dari antah berantah.

Seorang istri bangun sangat pagi untuk menyiapkan sarapan, mengurus anak-anak yang akan berangkat sekolah, sambil bersiap-siap untuk juga pergi ke kantor, tapi harus menyiapkan pakaian dan sepatu suaminya yang begitu bangun masih sempat duduk merokok. Bahkan sang suami berteriak karena kopinya belum terhidang di meja.

Tapi, saya tidak dapat begitu saja menjadikan gender sebagai topik pembicaraan di keluarga atau lingkungan saya. Kehidupan nyata bukanlah ruang pelatihan atau diskusi.

Wacana dan perdebatan tidak serta-merta bisa dilontarkan dalam peristiwa-peristiwa sesungguhnya.

Kecuali Anda mau menjadi aktivis gender yang kehadiran dan ucapannya selalu “menakutkan” orang lain. Mengadili setiap kesalahan orang yang jadi melongo karena “bukan bunda salah mengandung” dilahirkan di masyarakat patriarkis dan seksist begini.

\*\*\*

Bagaimana sih mengkomunikasikan Gender dengan masyarakat? Itu pertanyaan dari pendamping atau fasilitator masyarakat setelah mengalami hal pahit menghadapi kemarahan para bapak atau tokoh yang merasa terganggu ketika istrinya mulai menggunakan kata “gender” dalam percakapan bernada menggugat.

Wah.

“Kamu kan sudah gender… Sana pergi tangkap kambing sendiri…” kata seorang suami di Sumba Barat, kepada istrinya yang ikut kelompok belajar perempuan. Kesal. Kambing itu lepas dari kandang dan menjadi tugas istri untuk mengurusnya. Ternak besar tugas Bapak, ternak kecil, tugas Ibu.

“Kalau gender, berarti perempuan harus bisa panjat kelapa…” kata seorang Bapak, diikuti gelak tawa bersama. Suasana penuh canda di sebuah desa di TTU. Untung dalam suasana penuh canda dan kehangatan.

Gender, oh gender.

Kok bisa dibicarakan di balik gunung dan di lembah yang dalam di sana. Di tempat tanpa listrik. Tanpa ledeng. Tanpa TV. Dibawa siapakah gerangan? Fasilitator masyarakat. Pendamping.

\*\*\*

Saya tidak menggunakan istilah gender saat isu ini saya hadapi. Pada kehidupan nyata saya sendiri. Di kota. Pusat kemajuan di P. Jawa.

Jangankan nun jauh di perdesaan. Di luar Jawa sana lagi. Di perkotaan pun, mana bisa menggunakan kata gender itu untuk mendiskusikan –apalagi mempermasalahkan- pembagian peran perempuan dan lelaki. Memperbaiki akan lebih baik.

Mempermasalahkan? Wah, bahaya.

Saya pun bisa membayangkan bagaimana tokoh masyarakat dan para suami menganggap wacana gender yang dibawa pulang istrinya ke rumah itu sebagai “ajaran sesat”.

Fasilitator masyarakat pun kena getahnya. Lariii…. lintang pukang, kena amuk.

\*\*\*

Airmata seorang Bapak berlinang. Di pedalaman Kalimantan Tengah sana. Ini hanya sebuah pelatihan pemahaman konsep gender dan bagaimana menggunakannya dalam kerja pendampingan masyarakat.

“Mengapa, Pak?” Tanya saya.

“Teringat pada istri. Saya harap istri saya bisa memaafkan saya….” Katanya.

Betapa mendalamnya merasuk dalam benak pria ini, sesi pelatihan tentang Gender.

Saya pun termangu. Berdosakah saya, melukai hatinya?

\*\*\*

Filed under [1a-Fasilitator Note](http://riadjohani.wordpress.com/category/1a-fasilitator-note/), [4b-Gender Perspektif](http://riadjohani.wordpress.com/category/4b-gender-perspektif/) and tagged [fasilitator masyarakat](http://riadjohani.wordpress.com/tag/fasilitator-masyarakat/), [gender](http://riadjohani.wordpress.com/tag/gender/), [pengembangan masyarakat](http://riadjohani.wordpress.com/tag/pengembangan-masyarakat/) | [Tinggalkan komentar](http://riadjohani.wordpress.com/2012/05/07/gender-sebuah-istilah-yang-sulit-dikomunikasikan-2/#respond)

Jan11

[**Pelatihan untuk Fasilitator Masyarakat**](http://riadjohani.wordpress.com/2012/01/11/pelatihan-untuk-fasilitator-masyarakat/)

Posted on [11 Januari 2012](http://riadjohani.wordpress.com/2012/01/11/pelatihan-untuk-fasilitator-masyarakat/) by [riadjohani](http://riadjohani.wordpress.com/author/riadjohani/)

[Standar](http://riadjohani.wordpress.com/tag/fasilitator-masyarakat/)

Sebuah lembaga yang mengembangkan program pendampingan masyarakat -dengan agenda dan isu program apa pun- seharusnya menyelenggarakan penguatan kapasitas untuk para fasilitatornya. Baik itu fasilitator yang merupakan staf lembaga atau fasilitator yang berasal dari masyarakat dampingan.

Sangat mengherankan bila pada sebuah lembaga tidak dilakukan suatu pembelajaran para fasilitatornya sehingga mereka bahkan tidak memahami apa dan siapa seorang fasilitator di dalam program lembaganya, serta bagaimana mereka diharapkan berperan untuk mencapai tujuan program maupun lembaga. Tapi dalam kenyataannya seringkali fasilitator menjalankan kegiatan-kegiatan tanpa memahami kerangka strategis program tersebut dan hal ini menyebabkan dirinya tidak leluasa mengembangkan inovasi dan bersikap kreatif terhadap tantangan di wilayah dampingan yang menjadi tugasnya.

Para fasilitator masyarakat ini hanya menjalankan penugasan dari supervisor atau koordinator programnya dan terjadi penyeragaman kegiatan. Padahal jelas setiap lokasi program memiliki situasi berbeda dan seorang fasilitator harus mengembangkan caranya sendiri di wilayahnya.

Mengapa hal itu terjadi? Kendala utama seringkali adalah karena lembaga tidak memiliki program training dan penguatan kapasitas yang terstruktur. Kalaupun dilakukan pembelajaran berupa pertemuan bulanan atau dua mingguan di antara para staf lapangan, supervisor/koordinator program dan pimpinan lembaga, hal itu dilakukan secara tercecer. Sebagai LSM pengembangan program, biasanya tidak memiliki staf khusus untuk mengembangkan program training bagi kebutuhan staf/personil lembaganya, termasuk para fasilitator dari kalangan masyarakat yang sangat perlu diperkuat kapasitasnya sebagai penggerak dan juga fasilitator program.

Pelatihan internal lembaga (in-house training) perlu menjadi perhatian demi kepentingan masyarakat dampingan. Program akan bermanfaat bila para fasilitatornya bekerja secara baik, bukan hanya menjalankan daftar tugas tetapi memahami arah pemberdayaan dan perubahan masyarakat dampingan yang harus dikembangkan.

\*\*\*

Lembaga program yang “kaya” bisa membuat program pelatihan dengan membayar pelatih dari luar atau mengirim stafnya untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan lembaga penyedia pelatihan. Ini jelas sangat mahal dan tidak cukup karena hanya bisa meminta suatu pelatihan tertentu dan atau mengirim jumlah staf yang terbatas untuk mengikuti pelatihan.

Sementara itu, lembaga membutuhkan pelatihan yang mendukung programnya secara menyeluruh dan juga memperkuat kapasitas semua stafnya, termasuk fasilitator/kader/CO dari kalangan masyarakat. Belanja pelatihan kepada pihak luar tidak akan memenuhi seluruh kebutuhan pelatihan. Sangat mendasar bagi lembaga untuk menyusun program penguatan kapasitas dan pembelajaran, bukan hanya dalam format pelatihan (training) tetapi juga dalam berbagai format lainnya.

Kombinasi kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan lembaga, misalnya:pertemuan bulanan atau dua mingguan selain untuk monitoring juga untuk sharingpembelajaran kegiatan di lapangan bisa ditambah dengan pelatihan singkat berdasarkan kurikulum yang disusun bersama untuk mencapai suatu kapasitas para fasilitator masyarakat yang diharapkan, magang fasilitator baru kepada fasilitator lama, penugasan lapangan dengan backstopping dari fasilitator yang lebih berpengalaman untuk suatu kegiatan, penugasan membaca buku dan diskusi tematik berkala, meminta pelatihan tertentu kepada pihak luar untuk suatu materi penting, dan sebagainya.

\*\*\*

Jadi, pelatihan bukanlah satu-satunya format penguatan kapasitas yang perlu dikembangkan oleh lembaga. Namun ketika lembaga memiliki perhatian untuk memperkuat kapasitas stafnya -dalam hal ini fasilitator lembaga maupun masyarakat- hal itu akan menciptakan suatu semangat karena merasa mendapatkan perhatian dan penghargaan terhadap suatu pengembangan kemampuan. Suasana pembelajaran yang diciptakan lembaga akan mendorong upaya pembelajaran individu secara otonom. Spirit ini tidak akan berkembang bila lembaga tidak mempunyai agenda pelatihan dan pembelajaran apa pun untuk sumber daya manusia yang sangat penting itu.

Direktur LSM dapat menugaskan stafnya untuk menyiapkan sebuah pelatihan tertentu justru sebagai penghargaan atas kemampuannya -bukan sebaliknya menganggap itu sebagai sebuah “kerepotan” dari tugas pokok stafnya. Suasana ini perlu ada di sebuah LSM. Bila staf bersemangat dengan kesempatan ini, jangan sampai pimpinan lembaga justru merasa stafnya sedang mengerjakan tugas di luar job-desnya. Atau sebaliknya, pimpinan lembaga menganggap tugas ini sebagai peluang pengembangan kapasitas staf sebagai pelatih (trainer) internal lembaga, tetapi stafnya menganggap sebagai beban tambahan tanpa tambahan insentif.

Membangun program pelatihan dan pembelajaran adalah upaya mengembangkan kultur belajar dalam sebuah organisasi, bukan hanya sekedar untuk membuat pintar staf-stafnya tetapi menciptakan staf-staf yang selalu haus akan pengembangan diri. Bangga pada suatu peningkatan kapasitas dirinya dengan tidak terlalu melihatnya dari sisi insentif.

Sangat mengherankan jika staf LSM menganggap penguatan kapasitas dirinya itu sebagai penambahan beban kerja (tambah pinter, malah ditimpuki banyak tugas) atau tidak perlu kalau tidak disertai peningkatan insentif.  Tidak terfikirkan olehnya bahwa meningkatkan kapasitas diri itu bermanfaat untuk masyarakat yang didampingi. Lho, kalau pendampingnya bodo bagaimana mau memberdayakan dan mencerahkan masyarakat, hahaha.

\*\*\*

Berikut ini adalah contoh materi pelatihan dasar untuk para fasilitator masyarakat lembaga:

[Kisi-kisi Kurikulum Pelatihan Fasilitator Masyarakat-Ria](http://riadjohani.files.wordpress.com/2012/01/kisi-kisi-kurikulum-pelatihan-fasilitator-masyarakat-ria.pdf)

Pelatihan semacam ini bagus juga diikuti oleh semua jajaran stafnya dan para fasilitator/CO/kader dari kalangan masyarakat. Jadwal yang ada di belakang kurikulum disusun untuk rancangan proses pelatihan 3 hari secara full time. Bisa saja penerapannya diubah, pelatihan dibuat bertahap (dicicil) dan dilakukan sebulan sekali. Materi juga disesuaikan dengan kebutuhan. Misal ada materi tentang teknik penulisan laporan pendampingan yang bersifat review dan menarik pembelajaran (lesson learned) atau penulisan catatan harian (field diary) atau jurnal pendampingan.

Melalui pelatihan mengenai apa, siapa, mengapa dan bagaimana seorang fasilitator berperan dan bekerja di lapangan maka akan terbangun suatu kesamaam pemahaman dan penguatan komitmen untuk bekerja dan mengabdi bagi masyarakat.

Saya senang saja kalau diundang menjadi “pelatih tamu” dan bertemu dengan para fasilitator baru maupun lama. Saya selalu mengatakan yang sama:  *Semua materi pelatihan yang saya berikan perlu dipergunakan lagi untuk pelatihan serupa tetapi Anda lah menjadi pelatihnya.  Tentu saja Kawan-kawan perlu mencari sumber lain untuk melengkapi dan mengembangkan materi pelatihan yang lebih baik.  Kawan-kawan harus membantu orang lain belajar dan untuk itu harus belajar terlebih dahulu. Akan selalu ada para fasilitator yang baru yang perlu belajar dari Anda bila sudah menjadi fasilitator yang lebih lama.*

Pertanyaan yang penting menurut saya untuk dilontarkan kepada peserta pelatihan yang merupakan para fasilitator masyarakat, adalah: *Bagaimana perasaan Anda setelah beberapa sesi kita lalui?*

Senang sekali kalau mendapat jawaban: *Waaah, jadi semangat lagi menjadi fasilitator. Pokoknya saya mau jadi fasilitator handaaal….*

Buat saya pinter atau handal itu nomor dua, yang paling penting senang dan cinta menjadi fasilitator masyarakat. Karena itu, rancangan pelatihan untuk fasilitator sebaiknya tidak hanya bobot pada keterampilan sebagai fasilitator. Keterampilan dan kepiawaian tidak bisa dilatihkan dalam beberapa hari, itu hanya bisa berkembang di lapangan dengan jam terbang. Yang penting dalam pelatihan diberikan masukan tentang ruang lingkup kapasitas yang harus dikembangkan oleh seorang fasilitator masyarakat.

Selebihnya, pelatihan ini untuk membangun spirit, kebersamaan, dan kecintaan kepada kerja-kerja masyarakat.

\*\*\*

Fasilitator yang sudah lama berkecimpung menjadi fasilitator, jangan pernah bosan menceritakan apa dan siapa fasilitator masyarakat itu. Karena, selalu ada para fasilitator baru, dan mengherankan sekali bila mereka tidak memahami apa fasilitator itu. Apalagi kalau direkrut oleh sebuah proyek yang memberikan daftar tugas secara rinci, fasilitator masyarakat hanyalah sebagai operator saja.

Mungkin ke depan, para fasilitator akan semakin tidak ideologis tapi profesional.Seperti yang saya tulis di [“Sertifikasi Fasilitator – Kenapa?](http://riadjohani.wordpress.com/2011/12/01/sertifikasi-fasilitator-kenapa)“. Melalui sertifikasi fasilitator, standardisasi kompetensi akan disediakan oleh lembaga penyedia pelatihan yang mengeluarkan sertifikat tersebut.

Mungkin ini bagus ya, wong orang LSM sendiri perlu digaji untuk menjadi fasilitator, masyarakat pun barangkali harus diberi kesempatan untuk bekerja sebagai fasilitator asalkan terus mengembangkan kompetensinya.

Waaah, saya bukan fasilitator bersertifikat…. haha. Biarlah, perubahan jaman memang tak terhindari. Buat saya, menjadi fasilitator menjadi keterpanggilan, bukan sekedar profesi. Semi amatir, istilah teman saya.

\*\*\*

Filed under [2a-Modul Pelatihan](http://riadjohani.wordpress.com/category/2a-modul-pelatihan/), [3a-Community Development](http://riadjohani.wordpress.com/category/3a-community-development/) and tagged [fasilitator masyarakat](http://riadjohani.wordpress.com/tag/fasilitator-masyarakat/), [in-house training](http://riadjohani.wordpress.com/tag/in-house-training/), [Kurikulum pelatihan fasilitator](http://riadjohani.wordpress.com/tag/kurikulum-pelatihan-fasilitator/), [LSM](http://riadjohani.wordpress.com/tag/lsm/), [pelatihan berbasis comdev](http://riadjohani.wordpress.com/tag/pelatihan-berbasis-comdev/), [Training of Facilitation (ToF)](http://riadjohani.wordpress.com/tag/training-of-facilitation-tof/) | [Tinggalkan komentar](http://riadjohani.wordpress.com/2012/01/11/pelatihan-untuk-fasilitator-masyarakat/#respond)

Jan10

[**Fasilitator Masyarakat menurut Jim Ife**](http://riadjohani.wordpress.com/2012/01/10/fasilitator-masyarakat-menurut-jim-ife/)

Posted on [10 Januari 2012](http://riadjohani.wordpress.com/2012/01/10/fasilitator-masyarakat-menurut-jim-ife/) by [riadjohani](http://riadjohani.wordpress.com/author/riadjohani/)

[Standar](http://riadjohani.wordpress.com/tag/fasilitator-masyarakat/)

Pada tulisan [“Fasilitator Masyarakat; Runyamnya Sebuah Istilah”](http://riadjohani.wordpress.com/2012/01/10/fasilitator-masyarakat-runyamnya-sebuah-istilah) diperkenalkan sejumlah istilah yang serupa tapi tak sama untuk pendamping masyarakat atau fasilitator masyarakat.

Buku “Community Development; Creating Community Alterbatives, Vision, Analysis and Practices” yang ditulis Jim Ife dan diterbitkan oleh Longman, Tahun 1995,  merumuskan 4 golongan dan 22 jenis tugas pendamping masyarakat.  Tugas pendamping masyarakat terdiri dari: Tugas fasilitasi proses, tugas pembelajaran, tugas penghubung, dan tugas teknis untuk mengelola tahapan program. Artinya, Pendamping Masyarakat merupakan istilah yang lebih luas daripada Fasilitator Masyarakat.

Berhubung istilah Fasilitator Masyarakat (Community Facilitator) lebih populer dan banyak diberlakukan di Indonesia saat ini, saya menggunakan konsep dan penjabaran peran/tugas pendamping masyarakat Jim Ife sebagai salah satu alternatif konsep dan peran/tugas Fasilitator Masyarakat. Artinya, seorang Fasilitator Masyarakat bukan hanya berperan untuk mengelola proses (program/kegiatan) saja, melainkan juga memperkuat kapasitas masyarakat dengan agenda pembelajaran, membangun jaringan dan kerjasama dengan berbagai lembaga, serta mengerjakan manajemen kegiatan lapangan. Pada kenyataannya seorang CF memang mengerjakan semua itu.

Karena itu, istilah Pendamping Masyarakat dan Fasilitator Masyarakat itu konsepsi dan prakteknya sama.

Saya membuat beberapa bahan serahan untuk materi pelatihan fasilitator masyarakat berikut ini:

[(1) Konsep pendampingan masyarakat](http://riadjohani.files.wordpress.com/2012/01/1-konsep-pendampingan-masyarakat1.pdf)

[(2) Berbagai sebutan fasilitator masyarakat](http://riadjohani.files.wordpress.com/2012/01/2-berbagai-sebutan-fasilitator-masyarakat1.pdf)

[(3) Peran dan tugas fasilitator masyarakat](http://riadjohani.files.wordpress.com/2012/01/3-peran-dan-tugas-fasilitator-masyarakat1.pdf)

Filed under [1a-Fasilitator Note](http://riadjohani.wordpress.com/category/1a-fasilitator-note/), [3a-Community Development](http://riadjohani.wordpress.com/category/3a-community-development/) and tagged [CF](http://riadjohani.wordpress.com/tag/cf/), [comdev](http://riadjohani.wordpress.com/tag/comdev/), [community development](http://riadjohani.wordpress.com/tag/community-development/), [fasilitator masyarakat](http://riadjohani.wordpress.com/tag/fasilitator-masyarakat/), [Jim Ife](http://riadjohani.wordpress.com/tag/jim-ife/) | [Tinggalkan komentar](http://riadjohani.wordpress.com/2012/01/10/fasilitator-masyarakat-menurut-jim-ife/#respond)

Des1

[**Sertifikasi Fasilitator – Kenapa?**](http://riadjohani.wordpress.com/2011/12/01/sertifikasi-fasilitator-kenapa/)

Posted on [1 Desember 2011](http://riadjohani.wordpress.com/2011/12/01/sertifikasi-fasilitator-kenapa/) by [riadjohani](http://riadjohani.wordpress.com/author/riadjohani/)

[Standar](http://riadjohani.wordpress.com/tag/fasilitator-masyarakat/)

Tulisan ini dipublish juga di: [http://www.facebook.com/profile.php?id=1640566679#!/groups/211942375518984/doc/274444162602138/](http://www.facebook.com/profile.php?id=1640566679#%21/groups/211942375518984/doc/274444162602138/)

\*\*\*

Kita tak akan mencantumkan di KTP pekerjaan sebagai fasilitator. Atau tidak akan menjawab pertanyaan “Kerja apa mas/mbak?” dengan jawaban “fasilitator”. Bukan karena fasilitator itu tidak dikenal secara umum sebagai pekerjaan, tapi karena secara “formal” memang belum masuk ke dalam kategori profesi di Indonesia.

Saya baru mengerti arti “fasilitator sebagai profesi” dari Pak Slamet, konsultan Depdagri, pada saat lokakarya penyusunan modul ToT yang dikembangkan Ditjen PMD Depdagri pada tahun 2009. Sebagai profesi, maka harus ada sertifikasi fasilitator dari organisasi profesi yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan itu. Sertifikat dikeluarkan dengan menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi. Kalau fasilitator sudah menjadi profesi yang secara resmi dicanangkan pemerintah, akan masuk ke dalam buku daftar profesi di Indonesia yang tebalnya segede kulkas yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Saya juga baru melihat barang itu yang diperlihatkan oleh Pak Slamet kepada kami semua. Buku itu sangat tebal karena memuat daftar seluruh profesi di Indonesia termasuk ruang lingkup kompetensinya masing-masing.

Apa yang dimaksud dengan standar kompetensi seorang fasilitator? Sama dengan profesi lain, harus ada standar yang jelas sebagai fasilitator apa. Dokter saja ada spesialisasi. Begitu juga dengan advokat memiliki spesialisasi tertentu juga.

\*\*\*

 Kenapa muncul gagasan sertifikasi fasilitator?

 Gagasan ini muncul dari kenyataan bahwa semua program (pemerintah maupun non-pemerintah) menggunakan fasiliator sebagai pendamping masyarakat. Apalagi dengan adanya program PNPM yang membutuhkan puluhan ribu tenaga fasilitator masyarakat, diharapkan ada suatu kompetensi yang jelas untuk perekrutan tenaga fasilitator masyarakat tersebut. Seperti biasa, kompetensi yang “standar”  untuk jaminan mutu adalah bahasa yang umum digunakan oleh sebuah lembaga sertifikasi. Standar kompetensi seorang fasilitator harus disusun.

 Dan ini dimaksudkan untuk fasilitator masyarakat. Kalau fasilitator masyarakat, berarti ada di wilayah kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (atau nama lain) di tingkat daerah (kabupaten/kota).

 Jadi, gagasan ini juga muncul dengan dasar diterbitkannya Permendagri No.19 tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/kelurahan yang muatannya menyatakan bahwa pelatih/fasilitator PMD itu wajib memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Konsekuensi logis dari adanya sertifikasi fasilitator masyarakat, maka harus ada lembaga penyedia pelatihan (training provider) di setiap daerah (minimal per provinsi).

 Kalau berminat silakan baca di:

<http://www.depdagri.go.id/produk-hukum/2007/03/28/peraturan-mendagri-no-19-tahun-2007>

 Selain itu, Permendagri No.7 tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat digunakan sebagai dasar hukum gagasan sertifikasi fasilitator masyarakat. Permendagri ini mewajibkan desa/kelurahan memiliki KPM (istilah lain untuk fasilitator masyarakat) minimal 5 orang.

Terakhir, ada semacam “gerundelan” bahwa banyak fasilitator-fasilitator dari kalangan LSM yang melakukan pelatihan-pelatihan di wilayah tupoksi Depdagri dengan berkembangkan program-program penguatan tata pemerintahan -terutama program di masyarakat. Sementara materi pelatihannya seperti apa berada di luar jangkauan pemerintah. Pelatihan terkait musrenbang, penyusunan RPJMDesa, RKP Desa, Perdes, APB Desa, dll. memang banyak dilakukan oleh kalangan LSM yang mendampingi desa dengan atau tanpa kerjasama dengan pemda.

 Konon kabarnya telah diterbitkan surat edaran kemendagri mengenai hal ini sehingga jajaran kemendagri diminta untuk  memposisikan LSM sebagai mitranya dan bukan sebaliknya LSM menjadikan kemendagri sebagai mitra dalam program yang terkait tupksi kemendagri.

\*\*\*

Apa konsekuensi dari pengembangan sertifikasi fasilitator itu? Itu yang muncul dalam diskusi di milist LSM, yang terakhir saya ikuti adalah dua-tiga tahun silam. Tentu saja LSM berkepentingan dengan isu lembaga sertifikasi fasilitator ini karena:

* Apakah fasilitator itu memang bisa disebut profesi dan kompetensinya distandarkan karena fasilitator lebih bersifat filantropi dan voluntary?
* Apakah fasilitator dari kalangan LSM masih bisa diterima oleh masyarakat bila pemerintah menyatakan bahwa hanya fasilitator bersertifikat yang diakui pemerintah?
* Apakah fasilitator yang berkarakter filantropi yang digembleng oleh LSM dan berasal dari masyarakat sendiri akan digantikan oleh fasilitator bersertifikat dari “luar” yang tidak berakar ke masyarakat karena kehadirannya dalam rangka bekerja saja?
* Dan seterusnya.

 Setelah lokakarya di Depdagri tahun 2009 tersebut, saya ketinggalan berita tentang pengembangan lembaga sertifikasi yang naskah (konsep)nya sudah sempat dibuat itu.  Entah sudah sampai dimana sekarang status pengembangannya.

 Siapa tahu ada yang punya informasi terbaru?

\*\*\*

 Sertifikasi fasilitator dan fasilitator diakui sebagai sebuah profesi. Artinya, fasilitator bisa dicantumkan di KTP atau CV sebagai pekerjaan. Bisa disebutkan sebagai pekerjaan bila ditanya oleh tetangga, pekerjaannya apa. Apakah suatu masa akan tiba seperti itu?

Fasilitator sebagai kerja aktivis mungkin hanya tinggal kenangan.

 \*\*\*

Filed under [1a-Fasilitator Note](http://riadjohani.wordpress.com/category/1a-fasilitator-note/) and tagged [Ditjen PMD Kemendagri](http://riadjohani.wordpress.com/tag/ditjen-pmd-kemendagri/), [fasilitator masyarakat](http://riadjohani.wordpress.com/tag/fasilitator-masyarakat/), [KPMD](http://riadjohani.wordpress.com/tag/kpmd/), [musrenbang desa](http://riadjohani.wordpress.com/tag/musrenbang-desa/), [permendagri 19/2007](http://riadjohani.wordpress.com/tag/permendagri-192007/), [permendagri 7/2007](http://riadjohani.wordpress.com/tag/permendagri-72007/), [sertifikasi](http://riadjohani.wordpress.com/tag/sertifikasi/) | [1 Komentar](http://riadjohani.wordpress.com/2011/12/01/sertifikasi-fasilitator-kenapa/#comments)

### PERENCANAAN DAUR PROGRAM DALAM IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN

Tuesday, September 18, 2007  
Sumber:http://robertsiregar.blogspot.com/  
OLEH :  
ROBERT SIREGAR  
Dept. Urban Studies and Planning Program  
robert\_rppp@yahoo.com  
A.Pendahuluan  
Pembangunan adalah sebuah kegiatan yang kolosal, memakan waktu yang panjang, melibatkan seluruh warganegara dan dunia intrernasional, dan menyerap hampir seluruh sumber daya negara-bangsa. Karena itu, sudah seharusnya jika pembangunan dimenejemeni. Beberapa bentuk perencanaan yang dikenali sampai dengan saat ini antara lain: perencanaan proyek, perencanaan sektoral, perencanaan program pembangunan, perencanaan makro ekonomi, dan perencanaan wilayah dan kota. Kegiatan perencanaan sebagai besar merupakan proses tindakan mengubah kondisi dan pengarahan masyarakat yang biasanya dilakukan oleh organisasi pemerintah. Namun pada akhir-akhir ini gerakan sosial-politik masyarakat sangat dominan, sehingga tindakan perencanaan untuk mengarahkan masyarakat tanpa proses pelibatan dan partisipasi masyarakat akan menyebabkan berkurangnya atau tidak adanya legitimasi hasil suatu proses kegiatan perencanaan.  
Pertanyaan pokok yang diajukan dalam hal ini adalah (i) apa permasalahan pokok yang dihadapi oleh masyarakat pada saat ini? (ii) nilai-nilai seperti apa yang diadopsi dalam proses kegiatan perencanaan yang dapat dilakukan oleh pemerintah? bagaimana proses kegiatan perencanaan itu sendiri dapat dilakukan oleh lembaga perencanaan atau profesi perencana secara efektif sebagai alat pengambilan keputusan dan tindakan untuk memecahkan permasalahan masyarakat?  
Dengan melihat perkembangan situasi pada akhir-akhir ini, tulisan ini merupakan sumbangan pemikiran untuk dapat membantu memecahkan permasalahan kemasyarakatan melalui peningkatan kinerja perencanaan dengan pendekatan baru serta memperkuat proses perencanaan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif di berbagai tingkatan pemerintahan. Dalam UU 25/2004, mendefinisikan partisipasi masyarakat sebagai “...keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan...”. Masyarakat adalah ”... orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung risiko”. Dalam perspektif Undang-Undang No 25/2004, “partisipasi” merupakan salah satu pendekatan dalam perencanaan pembangunan yang “....dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.  
Daur program pengembangan masyarakat dapat dibagi ke dalam 4 tahap besar, yang meliputi identifikasi, perencanaan, pelaksanaan dan monitoring-evaluasi. Pembagian tahap ini sangat bersifat fleksibel dan menyesuaikan keadaan. Ada yang membaginya menjadi 3 tahap saja, yakni perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Tahap perencanaan meliputi: pengenalan ke masyarakat, penggalian kebutuhan (need assessment), menentukan tujuan dan sasaran, mengenali potensi dan kendala serta menyusun perencanaan. Tahap pelaksanaan meliputi: koordinasi, monitoring, dan manajemen kontinjensi (contingency management). Tahap evaluasi meliputi monitoring dan evaluasi itu sendiri. Secara sederhana daur program yang terdiri atas identifikasi, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dapat digambarkan berikut ini :  
  
  
  
  
B. Program Dan Kegiatan  
Intervensi pengembangan masyarakat di banyak negara berkembang memiliki keragaman, terutama dalam penggunaan istilah atau terminologi. Istilah yang sering digunakan, seperti: pengembangan masyarakat, pembangunan sosial, pembangunan pedesaan, pengentasan kemiskinan, memiliki definisi dan arti yang berbeda-beda. Skala perbedaan biasanya terletak pada sifat, cakupan, fokus dan bentuk program. Beberapa program pengembangan masyarakat biasanya mengarah pada kegiatan khusus seperti kesehatan, gizi, air dan sanitasi, pengembangan kepemimpinan, kredit pedesaan, pengentasan kemiskinan, penguatan masyarakat, penguatan kapasitas SDM, dll.  
Ada perbedaan mendasar dalam menggunakan istilah program dan kegiatan. Program lebih bersifat makro dan holistik, di mana seluruh komponen bergerak sebagai suatu sistem.  
Program pengembangan masyarakat adalah seluruh upaya untuk mencapai peningkatan taraf hidup, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Upaya tersebut secara khusus dikelola melalui sejumlah kegiatan. Jangka waktu kegiatan juga terbatas dengan cakupan garapan yang terbatas pula. Kegiatan yang umum dilakukan diantaranya meliputi identifikasi, sosialisasi, perencanaan, rapat koordinasi, pengendalian, monitoring, dan evaluasi  
C. Apa Itu Program ?  
Sebagaimana telah disebutkan di atas, program/kegiatan adalah sejumlah langkah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mengatasi suatu masalah atau isu. Memahami dengan jelas tentang apa yang dibutuhkan oleh suatu program/kegiatan, sangat penting untuk suksesnya evaluasi. Suatu program/kegiatan mengikuti beberapa kerangka logis sebagai berikut. Pertama, ada maksud atau sejumlah alasan mengapa sebuah program/kegiatan diperlukan – berupa suatu visi. Kedua, menentukan sasaran serta tujuan dari program/kegiatan, sebagai dasar dalam meraih visi. Ketiga, memerlukan sumberdaya seperti pendanaan, keahlian, dan perlengkapan yang mewujudkan aktifitas. Keempat, dengan berbagai aktifitas yang ada menghasilkan keluaran (ouput) dari program/kegiatan yang ditujukan untuk mencapai hasil-hasil (outcome) dalam memenuhi maksud dan tujuan yang telah ditentukan.  
Salah satu implikasi dari pemberlakuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah (22/99) dan Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (25/99) adalah, Kabupaten/Kota saat ini memiliki kewenangan untuk merencanakan dan mengelola pembangunan di daerahnya. Namun dalam era baru ini, pelaksanaan kewenangan daerah tersebut dituntut untuk lebih demokratis, terbuka, dan menyediakan peluang bagi berbagai pelaku untuk terlibat di dalamnya (partisipatif). Hal ini merupakan ide dasar dibutuhkannya PDPP, sebagai suatu program/kegiatan. Adapun sasaran dari PDPP adalah menyediakan suatu instrumen bagi pemerintah Kabupaten/Kota untuk merencanakan dan mengelola pembangunan daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil (kinerja), melibatkan masyarakat, berjangka menengah, dan mencangkup investasi pembangunan multi-sektoral  
Monitoring dan evaluasi program/kegiatan secara sederhana dapat diartikan sebagai aktifitas untuk melihat perkembangan dan menilai keberhasilan dari suatu program/kegiatan. Hal ini sangat diperlukan, karena akan memperbaiki kinerja dari program/kegiatan selama perjalanannya dan membantu program/kegiatan selanjutnya. Pengertian monitoring & evaluasi dapat dijelaskan secara terpisah. Monitoring adalah langkah pengamatan terhadap berbagai kegiatan yang berbeda untuk memastikan bahwa strategi dan langkah yang ditempuh telah sesuai prosedur. Monitoring biasanya melekat pada tahap pelaksanaan program/kegiatan. Artinya monitoring dilakukan pada saat program/kegiatan berjalan dan memiliki jangkauan jangka pendek.  
Evaluasi yang dimengerti pada umumnya adalah kegiatan tahap akhir suatu program/kegiatan untuk menilai apakah sebuah program/kegiatan dinilai berhasil atau gagal. Namun sebenarnya evaluasi dapat dibagi ke dalam 4 tingkatan: evaluasi pra¬program/kegiatan, evaluasi pada saat berjalan, evaluasi summatif (akhir) dan evaluasi dampak. Jadi evaluasi bukan merupakan kegiatan sekali saja pada saat akhir program/kegiatan. Tapi, evaluasi lebih sebagai kegiatan berkelanjutan selama program/kegiatan berjalan. Evaluasi berbeda dengan monitoring, di mana monitoring bertugas mengontrol apakah program/kegiatan telah berjalan di atas rencana, sementara evaluasi mengajukan pertanyaan apakah program/kegiatan telah berjalan pada jalur yang benar. Secara umum, monitoring dan evaluasi memiliki pertanyaan sebagai berikut:  
1. Apakah kita melakukan seperti yang kita rencanakan?  
2. Apakah itu berhasil? Kenapa berhasil atau kenapa tidak?  
3. Apakah kita akan mengulanginya lagi atau melakukan yang berbeda?  
Sejauh ini, kita sering mendengar tentang monitoring dan evaluasi, termasuk mengapa hal tersebut sangat penting untuk dilakukan. Tetapi apa yang dimaksud dengan evaluasi sebagai suatu proses yang partisipatif? Jawaban sederhananya adalah, menjadikan orang-orang yang terlibat pada atau terkena dampak dari suatu program/kegiatan (stakeholders) berpartisipasi dalam penyusunan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi.  
D.Konsep  
Monitoring dan evaluasi konvensional seringkali sangat rumit dan dilakukan oleh pihak (individu/lembaga) luar yang belum tentu terlibat dalam proses. Individu ataupun lembaga tersebut datang untuk mengumpulkan data dan kembali ke institusinya untuk menganalisa data. Dan oleh sebab itu, hasil analisanya jarang dapat diakses oleh para pelaku aktifitas yang dimonitor dan dievaluasi (kelompok sasaran). Selain itu, terminologi yang digunakan dalam monitoring dan evaluasi konvensional seringkali sulit untuk dapat dimengerti oleh kelompok sasaran, sehingga hasilnya pun kurang dapat digunakan oleh mereka.  
• Monitoring dan Evaluasi Partisipatif  
Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses monitoring dan evaluasi. Walaupun sudah ada evaluasi kinerja di tingkat dinas/kabupaten dalam bentuk dokumen LAKIP, sampai sekarang belum ada mekanisme yang menjelaskan feedback dari masyarakat tentang kwalitas proyek, nilai, dan kepuasan masyarakat desa terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan di desa. Sampai saat ini, pada awal tahun tidak pernah ada informasi mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan di salah satu daerah. Hal ini membuat masyarakat tidak mengetahui rencana pembangunan di desanya dan tidak menimbulkan rasa memiliki terhadap program dan proyek yang berjalan. Masyarakat juga tidak bisa melakukan fungsi kontrol terhadap kegiatan pembangunan.  
4 Rekomendasi: Perlu ada daftar proyek/kegiatan yang dibagi pada awal tahun kepada setiap desa. Daftar itu nanti menjadi dasar untuk menilai hasil proyek/program pada kegiatan Musrenbang tahun berikutnya. Setiap sektor mendapat hasil penilaian itu dan melaksanakan evaluasi sektoral. Input dari masyarakat desa harus masuk dokumen LAKIP. Partisipasi ini perlu dijamin dalam produk hukum daerah yang menjelaskan alur evaluasi masyarakat desa, supaya monitoring dan evaluasi partisipatif juga bermanfaat.  
• Kwalitas Data  
Kwalitas data perencanaan dan penganggaran-mulai dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten- masih rendah. Walaupun jumlah data sudah banyak, metode pengumpulan data dan pengelolaannya, misalnya update data, belum ada. Kondisi ini telah menghilangkan akuntabilitas kegiatan dan ukuran kinerja pemerintah. Untuk menilai kinerja pemerintah, harus ada data yang berkwalitas. Perkembangan pembangunan tidak dapat diukur kalau data pokok pada awal kegiatan tidak ditetapkan. Sampai sekarang indikator di beberapa dokumen perencanaan dan penganggaran tidak dapat diukur dengan jelas. Kalaupun sudah ada indikator, outcome dari salah satu program/kegiatan seringkali tidak jelas. Artinya, belum ada database yang cukup berkwalitas sebagai dasar pengukuran kinerja dan tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan menurut KepMen 29/2002, setiap kegiatan yang dianggarkan harus dapat diukur sampai tingkat benefit. Kelemahan tersebut mempersulit pelaksanaan anggaran kinerja secara murni.  
E.Penutup  
Dengan daur program dalam perencanaan kita akan dapat melihat bagaimana proses manajemen serta fungsi-fungsinya dalam pelaksanaan pembangunan. Sehingga dengan adanya daur atau cyrcle yang pada prinsipnya untuk efisensi dan efektifitas program yang ada. Dan hal paling penting juga dapat kita lihat pada partisipasi masyarakat dalam implementasi pembangunan, guna mendukung setiap program yang bersifat daur.

<http://hukumpengungsi.blogspot.com/2010/07/perencanaan-daur-program-dalam.html>

http://www.ar.itb.ac.id/wdp/wp-content/uploads/2007/04/1-PRA-Indonesia.pdf